

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Hasil Pemilihan Sampel**

Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit sebagai variabel independen terhadap tingkat korupsi sebagai variabel dependen. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu seluruh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) yang terdapat di Pulau Jawa pada tahun 2012 – 2015. Pemilihan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dikarenakan kota/kabupaten di Pulau Jawa yang sudah mendapatkan opini wajar dari BPK dan tingkat kasus korupsi di Pulau Jawa pada 3 provinsinya masuk pada urutan 10 terbanyak kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Kabupaten/Kota yang terdapat kasus korupsi
- b. Pemerintah Daerah Tingkat II yang memperoleh opini dari BPK dan memiliki jumlah temuan audit dan nominal tindak lanjut hasil audit
- c. Memiliki data lengkap untuk seluruh variabel pada tahun 2012 – 2015

Berdasarkan kriteria – kriteria tersebut, maka diperoleh sampel sebanyak 48 pemerintah daerah dari 119 pemerintah daerah.

**Tabel IV.1**  
**Perhitungan Pemilihan Sampel**

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Kota/Provinsi di Pulau Jawa	119
2	Kota/Kabupaten yang tidak terdapat kasus korupsi	(107)
3	<b>Jumlah Sampel</b>	12
4	Dikali : Jumlah Tahun	4
5	<b>Jumlah Observasi</b>	48

## 2. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan untuk memberikan gambaran terhadap variabel penelitian. Pengukuran analisis statistik deskriptif ini dilakukan terhadap variabel opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit sebagai variabel independen serta tingkat korupsi sebagai variabel dependen. Pengukuran penelitian ini dilakukan dengan aplikasi SPSS Versi 24. Analisis statistik deskriptif tersebut berkaitan dengan informasi *minimum*, *maximum*, *mean*, dan standar deviasi.

Berikut merupakan hasil dari analisis deskriptif yang dijelaskan pada tabel IV.2:

**Tabel IV.2**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
OA	48	,00	1,00	,4583	,50353
TA	48	9,00	25,00	16,6042	4,48040
TLHA	48	,00	1,00	,2340	,37604
CORRUPT	48	,00	3,00	,7708	,90482
Valid N (listwise)	48				

Sumber: SPSS 24, data diolah peneliti, 2018

Berdasarkan hasil dari perhitungan analisis statistik deskriptif diatas, didapatkan informasi nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan standar deviasi masing – masing dari variabel independen dan depenen pada penelitian ini. Berikut adalah penjelasan analisis deskriptif berdasarkan tabel diatas:

**a. Variabel Dependen (Tingkat Korupsi)**

Tingkat korupsi diukur dari jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Kasus korupsi yang ditangani oleh KPK merupakan kasus per individu sehingga jumlah kasus yang terjadi di kabupaten/kota merupakan jumlah individu yang tersangkut kasus korupsi pada kabupaten/kota tersebut. Dari 48 observasi, tingkat korupsi memiliki nilai minimum 0 pada tahun tertentu yang dimiliki oleh beberapa kota/

kabupaten seperti di Kabupaten Lebak di tahun 2012, Kota Tegal di tahun 2012 dan 2013, serta Kota Semarang di tahun 2014 dan 2015. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap tahunnya di setiap kota/kabupaten terjadi kasus korupsi.

Seperti di kota Kendal untuk tahun 2012 dan 2013 terdapat kasus korupsi salah satunya yaitu kasus suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melibatkan Sekretaris Daerah Kota Semarang. Namun, kasus tersebut telah ditangani oleh KPK pada tahun 2012 hingga tahap putusan MA sehingga kasus yang melibatkan Sekretaris Daerah sebagai tersangka tersebut tidak ada kembali pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, terdapat kasus korupsi yang juga terkait dengan kasus pemberian suap yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah namun dengan pihak yang berbeda yaitu melibatkan Walikota Semarang yang bersama – sama melakukan tindak pidana korupsi pemberian suap pada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kasus atas tersangka Walikota Semarang itupun sudah mencapai putusan MA pada tahun 2013, sehingga pada tahun selanjutnya yaitu 2014 dan 2015 tidak terdapat kasus korupsi di Kota Semarang.

Nilai maksimum tingkat korupsi pada tabel diatas yaitu 3. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat kota/kabupaten yang memiliki 3 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK selama satu tahun. Kota/kabupaten yang memiliki kasus korupsi tersebut ialah Kabupaten

Lebak di tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun – tahun tersebut di kabupaten Lebak tersebut terdapat kasus korupsi yang tengah di tangani oleh KPK sebanyak 3 individu yang tersangkut kasus korupsi.

Pada kabupaten Lebak di tahun 2013 terjadi kasus korupsi yaitu kasus penyuapan terkait sengketa pilkada kabupaten Lebak. Kasus korupsi tersebut menyangkut beberapa pihak salah satunya Gubernur Banten yang memberikan suap agar hakim di Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2014 terungkap lagi pihak yang tersangkut kasus tersebut yaitu Wakil Bupati Lebak dan Anggota DPRD Banten.

Nilai *mean* sebesar 0,7708 bahwa tingkat korupsi rata – rata ialah sebesar 0,7708. Sedangkan standar deviasi yang ada menunjukkan angka sebesar 0,90482. Angka tersebut didapat karena tidak setiap tahunnya ada kasus korupsi pada suatu kabupaten/kota yang terdapat di Pulau Jawa.

## **b. Variabel Independen**

### **1) Opini Audit**

Opini audit yang diprosikan dengan angka 1 untuk kabupaten/kota yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan angka 0 untuk kabupaten/kota yang meraih opini selain WTP. Berdasarkan pada tabel IV.2 diatas, nilai minimum pada opini audit yaitu 0. Nilai berarti bahwa beberapa kabupaten/kota meraih opini selain WTP. Terdapat dua kabupaten/kota yang selama kurun waktu

2012 – 2015 tidak mendapat opini audit WTP dari BPK yaitu Kota Tegal dan Kabupaten Kendal. Keduanya hanya meraih opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tahun 2012 – 2015.

Salah satu penyebab Kota Tegal meraih opini audit WDP di tahun 2015 ialah terdapat nilai pendapatan hibah dan beban operasi tahun 2015. Namun, dalam pendapatan hibah dan beban operasi di laporan operasional tidak termasuk pendapatan dan beban BOS APBN yang diterima dan digunakan oleh sekolah negeri di Kota Tegal. Sisa kas dana BOS tersebut pun belum tersaji pada akun kas lainnya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. BPK pun tidak mendapatkan bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat karena tidak tersedianya data dan informasi pada satuan kerja terkait. Hal ini lah yang membuat BPK memberikan opini audit WDP untuk Kota Tegal.

Nilai maksimum pada opini audit yaitu 1 yang memiliki arti bahwa terdapat kabupaten/kota yang telah meraih opini audit WTP dari BPK. Kabupaten/kota yang meraih opini audit WTP selama tahun 2012 – 2015 yaitu Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan selama 4 tahun tersebut Kota Surabaya telah menyajikan secara wajar semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Nilai *mean* pada opini audit menunjukkan angka 0,4583. Besarnya standar deviasi yang diperoleh yaitu 0,50353.

## 2) Temuan Audit

Temuan audit dihitung berdasarkan jumlah temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang – undangan. Berdasarkan tabel IV.2 menunjukkan nilai minimum 9 temuan. Nilai minimum tersebut dimiliki oleh Kabupaten Lebak di tahun 2015 dan Kabupaten Bangkalan di tahun 2014. Hal ini dapat diartikan bahwa pada kedua kabupaten tersebut telah menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan yang ada dan melaksanakan segala rekomendasi yang di berikan oleh BPK pada tahun sebelumnya sebagai perbaikan untuk tahun mendatang.

Nilai maksimum temuan audit pada tabel IV.2 yaitu 25. Angka ini menunjukkan bahwa dalam satu kabupaten/kota didapatkan 25 temuan audit dalam satu tahun. Kabupaten Kerawang yang memiliki 25 temuan audit pada tahun 2012. Temuan tersebut berupa 13 temuan atas SPI dan 12 temuan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Beberapa temuan itu ialah terdapat penyajian aset tetap dan aset lainnya dalam neraca pemerintah Kabupaten Kerawang per 31 Desember 2012 yang tidak dapat diyakini kebenarannya, adanya kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Kerawang atas kas di bendahara pengeluaran tidak sesuai dengan ketentuan, serta penggunaan anggaran belanja jasa pemasangan iklan pada Dinas Komunikasi dan Informatika tidak efektif.

Nilai *mean* sebesar 16,6042 menunjukkan bahwa temuan audit pada kabupaten/kota di Pulau Jawa rata – rata 16,6042. Standar deviasi yang di dapatkan dari temuan audit ini adalah 4,48040. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari *mean* menunjukkan bahwa sebaran data temuan audit relatif baik.

### **3) Tindak Lanjut Hasil Audit**

Tindak lanjut hasil audit pada penelitian ini diukur dengan persentase besarnya total tindak lanjut yang disetorkan ke kas daerah dengan total rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Nilai minimum menunjukkan angka 0 yang dimiliki oleh beberapa kabupaten/kota. Angka 0 ini mengartikan bahwa selama tahun tersebut pemerintah daerah kabupaten/kota tidak melaksanakan satupun rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Kabupaten/kota yang memiliki persentase atas tindak lanjut hasil audit 0% selama tahun 2012 – 2015 ialah kota Cilegon.

Pada tahun 2015 terdapat rekomendasi dari BPK kepada Pemerintah Daerah Kota Cilegon untuk menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran, denda keterlambatan, serta pengadaan barang yang mendahului kontrak dan tidak diyakini kewajarannya yang mengindikasikan kerugian daerah sebesar Rp 381.750.000,00. Namun, rekomendasi yang diberikan oleh BPK tidak ditindaklanjuti oleh Pemda Kota Cilegon hingga batas waktu seharusnya sehingga



pada tahun tersebut tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait sejumlah uang yang merupakan indikasi kerugian daerah yang harus disetorkan kembali pada kas daerah.

Nilai maksimum untuk tindak lanjut hasil audit menunjukkan angka 1,00. Angka 1,00 tersebut berarti bahwa terdapat kabupaten/kota yang melaksanakan rekomendasi dari BPK 100%. Kabupaten/kota tersebut yaitu Kabupaten Lebak di tahun 2015, Kabupaten Sidoarjo di tahun 2013, Kota Surabaya di tahun 2013 dan 2014, serta Kabupaten Bangkalan di tahun 2012.

Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya yang merupakan kota yang memiliki persentase tertinggi tindak lanjut hasil audit pada tahun 2012 – 2015. Persentase tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya selama 3 tahun terhitung 2013-2015 hampir sempurna karena setiap tahunnya hampir mencapai 100% dalam menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Nilai *mean* menunjukkan angka 0,2340. Standar deviasi menunjukkan angka 0,37604. Nilai *mean* lebih kecil daripada standar deviasi dikarenakan tidak setiap tahunnya seluruh kabupaten/kota melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK.

### 3. Uji Asumsi Klasik

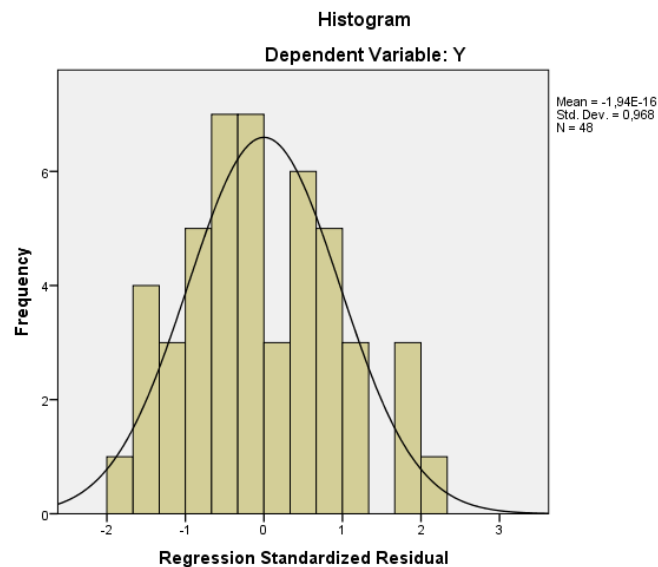
Beberapa pengujian perlu dilakukan untuk mendapatkan ketepatan model yang akan dianalisis. Beberapa uji yang dilakukan untuk uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Berikut merupakan hasil dari pengujian asumsi klasik:

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen yang diuji memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi dinilai baik ketika memiliki data yang normal dalam pendistribusian. Dalam uji normalitas ini, pengujian menggunakan grafik histogram dan grafik P-Plot serta uji *one sample Kolmogorov smirnov*.

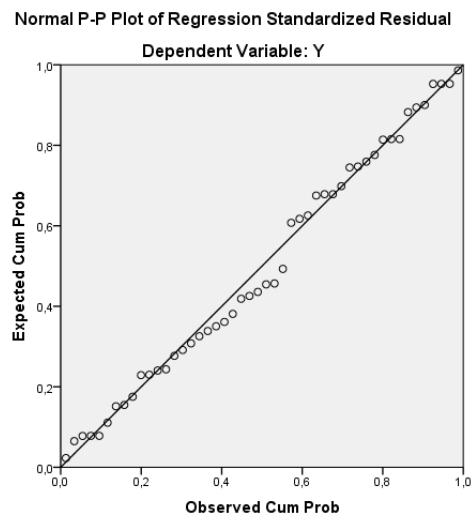
##### 1) Uji Normalitas dengan Grafik

Berdasarkan hasil pengujian di Gambar IV.1 terlihat grafik histogram yang seimbang tidak cenderung melenceng ke salah satu sisi. Hasil berdasarkan grafik histogram tersebut menggambarkan bahwa data terdistribusi secara normal.



**Gambar IV.1**  
**Hasil Uji Normalitas dengan Histogram**

Pada gambar IV.2 grafik P-Plot pun terlihat titik – titik yang ada menyebar disekitar garis diagonal. Data dapat dikatakan berdistribusi secara normal apabila data tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Garis diagonal merupakan penggambaran kondisi yang ideal yang mana data berdistribusi normal. Hasil dari P-Plot ini menunjukkan penelitian ini memiliki data yang normal dan dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi normalitas.



**Gambar IV.2**  
**Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot**

2) Uji *one sample Kolmogorov-smirnov*

Berikut merupakan hasil uji *one sample kolmogorov-smirnov* pada tabel IV.3

**Tabel IV.3**  
**Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardize d Residual
N		48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,74267042
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,086
	Negative	-,056
Test Statistic		,086
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 24, 2018

Hasil dari uji *one sample kolmogorov-smirnov* pada tabel IV.3 diatas menunjukkan nilai dari *kolmogorov-smirnov* sebesar 0,086 dengan tingkat signifikansi 0,200 atau 20%. Tingkat signifikansi yang didapatkan dari hasil uji ini menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05 atau 5%. Melihat hasil pengujian ini maka dapat disimpulkan bahwa nilai terdistribusi secara normal. Hasil uji *kolmogorov-smirnov* sudah menunjukkan data yang normal yaitu signifikansi diatas 0,05, maka uji normalitas telah terpenuhi.

#### b. Uji Multikolonieritas

Setelah dilakukan uji normalitas, maka selanjutnya dilakukan uji multikolonieritas. Model regresi dinilai baik jika regresi tidak ada gejala korelasi yang kuat diantara variabel bebasnya. Berikut ini merupakan hasil uji multikolonieritas pada tabel IV.4

**Tabel IV.4**  
**Uji Multikolonieritas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,425	,478		5,076	,000		
	OA	-,518	,254	-,288	-2,039	,048	,766	1,306
	TA	-,074	,026	-,368	-2,819	,007	,899	1,113
	TLHA	-,784	,356	-,326	-2,199	,033	,698	1,433

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah peneliti dengan SPSS 24, 2018

Model regresi dapat dikatakan bebas dari masalah multikolonieritas jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan *Variance Inflation Factor* (VIF)  $< 10$ . Berbagai peneliti lebih banyak yang menggunakan nilai *tolerance* dan VIF untuk menentukan ada atau tidaknya multikolonieritas dalam model regresi linier berganda dibanding dengan parameter lainnya.

Tabel IV.4 diatas menunjukkan nilai *tolerance* untuk variabel opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit yang masing – masing nilainya lebih besar dari 0,10. Nilai *tolerance* masing – masing variabel yaitu 0,766 ; 0,899 ; 0,698. Kemudian, untuk nilai VIF hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10. Atas hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (independen) dalam model regresi tidak terdapat masalah multikolonieritas atau telah lolos uji multikolonieritas.

### **c. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual dalam satu pengamatan dengan pengamatan lainnya pada model regresi. Model pengujian yang biasa digunakan oleh para peneliti yaitu Uji *Run Test*.

**Tabel IV.5**  
**Uji Autokorelasi dengan *Run Test***

<b>Runs Test</b>	
Unstandardized Residual	
Test Value <sup>a</sup>	-,10607
Cases < Test Value	24
Cases >= Test Value	24
Total Cases	48
Number of Runs	20
Z	-1,313
Asymp. Sig. (2-tailed)	,189

a. Median

Sumber : Data diolah peneliti dengan SPSS 24, 2018

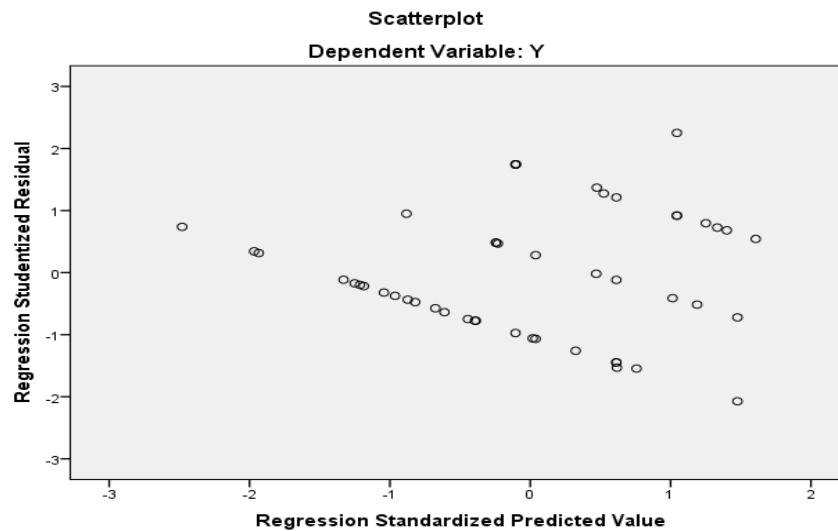
Berdasarkan tabel IV.5 untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan uji *Run Test*. Berdasarkan hasil pengujian dengan *Run Test* pada tabel diatas, diketahui nilai Asymp. Sig. sebesar 0,189. Nilai Asymp.Sig. yang dihasilkan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat autokorelasi.

#### **d. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual antara observasi satu dengan observasi lainnya. Peneliti menggunakan dua cara dalam menguji heteroskedastisitas, yaitu:

### 1) *Scatterplot*

Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *Scatterplot* mempunyai dasar pengambilan keputusan yaitu terdapat suatu pola tertentu yang berupa titik – titik yang membentuk pola yang teratur seperti bergelombang, menyebarkan, kemudian menyempit maka dapat dikatakan bahwa terjadi heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan *Scatterplot* :



**Gambar IV.3**  
**Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatterplot***

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan *Scatterplot* pada gambar IV.3 terlihat bahwa tidak terdapat pola tertentu. Semua titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk



mendukung uji *Scatterplot* maka dilakukan pengujian selanjutnya yaitu uji *Glejser*.

## 2) Uji *Glejser*

Uji *Glejser* ini merupakan uji hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya indikasi heteroskedastisitas pada sebuah model regresi dengan cara meregres absolute residual terhadap variabel independen. Tabel IV.6 menunjukkan hasil uji *glejser* :

**Tabel IV.6**  
**Uji Heteroskedastisitas dengan *Glejser***

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,013	,234		4,333	,000		
	X1	-,181	,124	-,224	-1,458	,152	,766	1,306
	X2	-,014	,013	-,155	-1,097	,278	,899	1,113
	X3	-,344	,174	-,317	-1,976	,054	,698	1,433

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 24, 2018

Berdasarkan hasil uji *Glejser* pada tabel IV.6 diatas, diketahui bahwa nilai signifikasi ketiga variabel independen masing – masing yaitu 0,152; 0,278; dan 0,054. Ketiganya memiliki nilai signifikasi diatas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

#### 4. Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah layak digunakan karena telah terbebas dari masalah normalitas data, tidak terdapat multikolonieritas, autokorelasi, serta heteroskedastisitas. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak terdapat masalah dalam uji asumsi klasik. Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan pengujian regresi linier berganda.

Analisis linier berganda bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap variabel dependen yaitu tingkat korupsi. Berikut merupakan hasil uji analisis regresi linier berganda pada tabel IV.7 :

**Tabel IV.7**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,425	,478		5,076	,000		
	OA	-,518	,254	-,288	-2,039	,048	,766	1,306
	TA	-,074	,026	-,368	-2,819	,007	,899	1,113
	TLHA	-,784	,356	-,326	-2,199	,033	,698	1,433

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 24, 2018

Berdasarkan tabel diatas, model analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Corrupt} = 2,425 - 0,518\text{OA} - 0,074\text{TA} - 0,784\text{TLHA} + e$$

Dari persamaan regresi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) Nilai konstanta sebesar 2,425 artinya bahwa jika nilai variabel independen opini audit (X1), temuan audit (X2), dan tindak lanjut hasil audit (X3) bernilai nol, maka tingkat korupsi akan meningkat sebesar 2,425.
- b) Koefisien regresi variabel opini audit (X1) sebesar -0,518 artinya jika variabel opini audit meningkat 1 poin dan variabel lainnya konstan maka akan menurunkan tingkat korupsi sebesar 0,518.
- c) Koefisien regresi temuan audit (X2) sebesar -0,074 artinya jika variabel temuan audit meningkat 1 temuan dan variabel lainnya konstan maka akan menurunkan tingkat korupsi sebesar 0,074.
- d) Koefisien regresi tindak lanjut hasil audit (X3) sebesar -0,784 artinya jika variabel tindak lanjut hasil audit meningkat 1 persen dan variabel lainnya konstan maka akan menurunkan tingkat korupsi sebesar 0,784.

## 5. Pengujian Hipotesis

### a. Uji Statistik t

Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial signifikansi pengaruh satu variabel bebas (independen) secara individu terhadap variabel terikat. Uji t ini dilakukan dengan pengujian menggunakan kriteria berdasarkan  $t_{hitung}$  dari setiap variabel bebas (independen) terhadap nilai  $t_{tabel}$ . Penelitian ini

nilai df (n-k) dengan n merupakan jumlah observasi penelitian dan k merupakan jumlah variabel bebas dan terikat. Nilai df yang didapatkan sebesar 44 (48-4). Nilai  $t_{tabel}$  untuk nilai df 44 dan signifikansi 0,05 yaitu 2,01537.

Hasil pengujian untuk memprediksi tingkat korupsi dengan menggunakan variabel opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit dapat terlihat pada tabel IV.8 :

**Tabel IV.8**  
**Hasil Pengujian Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,425	,478		5,076	,000		
	OA	-,518	,254	-,288	-2,039	,048	,766	1,306
	TA	-,074	,026	-,368	-2,819	,007	,899	1,113
	TLHA	-,784	,356	-,326	-2,199	,033	,698	1,433

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 24, 2018

Berdasarkan tabel IV.8 diatas maka dapat dilakukan pengujian hipotesis – hipotesis sebagai berikut :

### 1) Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu H1: Opini Audit (X1) berpengaruh terhadap Tingkat Korupsi (Y). Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel opini audit (X1) adalah sebesar -2,039 dengan tingkat

signifikansi 0,048. Nilai dari  $t_{tabel}$  sebesar 2,01537. Nilai  $t_{hitung}$  yang dihasilkan lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  dan nilai signifikansi opini audit lebih kecil dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa hubungan opini audit terhadap tingkat korupsi berpengaruh signifikan.

## **2) Pengujian Hipotesis 2**

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu H2: Temuan Audit (X2) berpengaruh terhadap Tingkat Korupsi (Y). Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel temuan audit (X2) adalah sebesar -2,819 dengan tingkat signifikansi 0,007. Nilai dari  $t_{tabel}$  sebesar 2,01537. Nilai  $t_{hitung}$  yang dihasilkan lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  dan nilai signifikansi temuan audit lebih kecil dari 0,007 maka dapat diartikan bahwa hubungan opini audit terhadap tingkat korupsi berpengaruh signifikan.

## **3) Pengujian Hipotesis 3**

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu H3: Tindak Lanjut Hasil Audit (X3) berpengaruh terhadap Tingkat Korupsi (Y). Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel tindak lanjut hasil audit (X3) adalah sebesar -2,199 dan tingkat signifikansi 0,033. Nilai dari  $t_{tabel}$  sebesar 2,01537. Nilai  $t_{hitung}$  yang dihasilkan lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  dan nilai signifikansi opini audit lebih kecil dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa hubungan opini audit terhadap tingkat korupsi berpengaruh signifikan.

### b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis determinasi digunakan digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Nilai dari koefisien determinasi memiliki nilai 0 hingga 1. Hal ini dapat diartikan semakin mendekati angka 1, maka variabel independen tersebut dinilai sangat baik dalam memberi prediksi yang dinilai tepat terhadap variabel dependen pada suatu penelitian.

Berikut ini merupakan hasil uji Koefisien Determinasi pada tabel IV.9:

**Tabel IV.9**  
**Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,571 <sup>a</sup>	,326	,280	,76757

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 24, 2018

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, didapatkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,280 atau 28%. Nilai dari *Adjusted R Square* digunakan karena dalam model regresi pada penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel bebas. Nilai *Adjusted R Square* ini menjelaskan bahwa variabel independen yang terdiri dari opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit menjelaskan variabel dependen berupa tingkat

korupsi sebesar 28% dan 72% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

**c. Uji Signifikasi Simultan (Uji F)**

Uji signifikasi simultan ( Uji F) digunakan untuk apakah variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen pada model regresi. Uji ini dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$ . Pada penelitian ini,  $df_1$  adalah 2 (jumlah variabel -1) dan  $df_2$  adalah 44 ( $n-k-1$ ,  $n$  merupakan jumlah observasi sebesar 48 dan  $k$  adalah jumlah variabel bebas dan terikat sebesar 4). Nilai  $F_{tabel}$  yang didapatkan sebesar 3,21. Dalam menguji apakah variabel – variabel independen secara bersama – sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi, maka dibuatlah hipotesis. Berikut hasil pengujian uji signifikan simultan (uji F) pada tabel IV.10 :

**Tabel IV.10**  
**Hasil Pengujian Uji Signifikasi Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12,556	3	4,185	7,104	,001 <sup>b</sup>
	Residual	25,923	44	,589		
	Total	38,479	47			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Data diolah oleh peneliti dengan SPSS 24, 2018

Dari hasil pengujian diatas, besarnya  $F_{hitung}$  adalah 7,104. Hasil ini menunjukkan bahwa  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  yaitu 3,21. Tingkat

signifikansi yang didapatkan yaitu 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit bersama – sama berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat korupsi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Opini Audit Terhadap Tingkat Korupsi**

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan mengenai pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi, didapatkan hasil bahwa variabel opini audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Heriningsih (2014), Damiati dan Rini (2016), Rina dan Erlanda (2016), dan Heriningsih dan Marita (2013) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini mendukung dari hasil penelitian Masyitoh dkk.,2015, Algameta (2016), serta Rini dan Sarah (2014) yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara opini audit terhadap tingkat korupsi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rini dan Sarah (2014) mengungkapkan bahwa 97% kabupaten yang terkena kasus korupsi merupakan kabupaten yang mendapatkan opini tidak baik. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa opini audit yang baik mengindikasikan bebas dari korupsi. Masyitoh dkk.,2015 pun mengungkapkan bahwa pemerintah daerah yang memperoleh pernyataan tidak memberikan pendapat dari auditor



memiliki persepsi korupsi yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar.

Terdapat pengaruh antara opini audit terhadap tingkat korupsi dapat disebabkan karena opini audit merupakan keseluruhan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan BPK tentunya dilakukan dengan tujuan untuk mencegah atau mendeteksi adanya tindak kecurangan yang terjadi pada pemerintah daerah baik kabupaten atau kota. Opini audit yang diberikan mencerminkan pemerintah daerah telah melakukan pengelolaan secara baik dan tidak ditemukannya indikasi – indikasi kecurangan yang mengarah pada tindak korupsi.

Kabupaten Lebak memiliki opini WDP pada tahun 2012 hingga tahun 2014. Pada tahun 2013 dan 2014 terdapat kasus korupsi di Kabupaten Lebak terkait dengan kasus sengketa pilkada Kabupaten Lebak yang salah satunya yang tersangkut kasus korupsi ini ialah wakil bupati Kabupaten Lebak. Ia tersangkut kasus penyuapan untuk mempengaruhi putusan atas sengketa pilkada tersebut. Segera ditanganinya masalah tersebut membuat pemerintah Kabupaten Lebak berbenah diri sehingga ditahun selanjutnya Kabupaten Lebak mendapatkan opini audit WTP dari BPK dan tidak ada lagi kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Lebak pada tahun 2015.

Menurut teori keagenan pemerintah daerah sebagai *agent* yang mengemban amanah dalam mengelola sumber daya yang berupa APBD sehingga memiliki informasi yang lebih mengenai APBD (*asymmetry*

*information*) dibandingkan dengan *principal* yang dalam hal ini adalah masyarakat. *Asymetri information* tersebut nantinya akan berakibat timbulnya *moral hazard* dalam hal ini adalah korupsi. Opini audit yang baik merupakan hasil dari pemeriksaan yang tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya penyimpangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Opini audit yang baik maka masyarakat sebagai *principal* yakin bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* telah menjalankan pemerintahan dengan baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang ada sehingga kemungkinan adanya tindak korupsi menjadi kecil.

Menurut teori *stewardship* yang merupakan teori yang dibangun atas dasar kepercayaan dalam bertanggung jawab dan kejujuran melihat bahwa opini audit yang baik membuat masyarakat yang mempercayakan kepada pemerintah daerah dalam mengelola APBD. Masyarakat percaya bahwa pemerintah daerah dapat bertanggung jawab atas tugasnya serta dapat berlaku jujur dalam menjalankan pemerintahan sehingga untuk potensi terjadinya tindak korupsi sangat kecil karena pemerintah memegang kepercayaan serta tanggung jawab yang telah diberikan dari masyarakat.

BPK mengeluarkan opini audit yang baik dalam hal ini adalah Wajar Tanpa Pengecualian karena melihat bahwa apa yang telah disajikan pada laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara baik dan wajar. Hal tersebut tentu memperlihatkan bahwa tidak ada bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

## 2. Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan mengenai pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi didapatkan hasil bahwa temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Heriningsih (2014), Damiati dan Rini (2016), dan Algameta (2016) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara temuan audit terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Yuliyana dan Setyaningrum (2016), Masyitoh dkk.,2015, dan Liu Lin (2012) yang mengatakan bahwa temuan audit memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi.

Menurut hasil penelitian Masyitoh dkk.,2015 temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap perundang – undangan berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi. Hal ini dikarenakan ketidakpatuhan terhadap perundang – undangan dapat menyebabkan kerugian negara serta potensi kerugian negara, sehingga dapat mengindikasikan terjadinya korupsi. Sesuai hasil penelitian Liu Lin (2012) pada pemerintah daerah China pun menunjukkan deteksi upaya penipuan berpengaruh positif terhadap korupsi. Maka semakin banyaknya temuan oleh auditor dapat mengindikasikan adanya kasus korupsi.

Pada audit yang dilakukan BPK pada Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2012 ditemukan temuan audit berupa

mekanisme penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pada kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit serta sarana dan prasarana puskesmas tidak dapat menjamin diperolehnya harga yang ekonomis dan wajar. Atas temuan tersebut ditahun 2013 terungkaplah kasus korupsi berupa pengadaan alat kesehatan kedokteran umum puskesmas Kota Tangerang Selatan APBD tahun 2012 dimana kasus korupsi tersebut melibatkan Kepala Bidang SDK dan Promkes Dinkes Pemkot Tangerang Selatan. Hal ini memperlihatkan bahwa temuan – temuan audit bisa jadi merupakan indikasi adanya tindak korupsi.

Menurut teori keagenan temuan audit yang merupakan indikasi bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* belum melaksanakan pemerintahan sepenuhnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Berkurangnya temuan audit memperlihatkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pemerintahan sesuai standar dan ketentuan sehingga adanya *asymmetry information* antara pemerintah daerah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal* terminimalisir dan akibat dari *asymmetry information* berupa korupsi akan berkurang.

Menurut teori *stewardship* sedikitnya temuan yang ditemukan oleh BPK dalam proses audit memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memegang tanggung jawab serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini membuat kepercayaan pemberi wewenang yaitu masyarakat meningkat karena dengan

rendahnya temuan audit maka adanya potensi terjadi korupsi akan semakin rendah.

Temuan audit dikatakan dapat berpengaruh terhadap tingkat korupsi dikarenakan temuan audit dapat menyebabkan kerugian negara, adanya potensi kerugian keuangan negara, serta ketidakekonomisan dan ketidakefektifan. Temuan audit pun mencerminkan ketidakefektifan sistem pengendalian intern dari pemerintah kabupaten/kota. Temuan audit yang menimbulkan potensi kerugian keuangan negara merupakan bukti bahwa adanya penyalahgunaan terhadap pengelolaan anggaran sehingga anggaran yang ada tidak dapat digunakan secara efisien. Temuan – temuan atas penyalahgunaan tersebut harus di investigasi lebih lanjut karena merupakan indikasi adanya korupsi. Hal dapat dikatakan bahwa temuan audit yang semakin banyak mengindikasikan ada praktek – praktek kecurangan berupa penyalahgunaan pengelolaan anggaran maupun kebijakan yang nantinya berpotensi akan adanya tindak korupsi yang dilakukan di kalangan pemda kabupaten/kota.

### **3. Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi**

Berdasarkan hasil pengujian mengenai pengaruh tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara tindak lanjut hasil audit dengan tingkat korupsi. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu oleh

Mayshitoh dkk. (2015), Damiati dan Rini (2016), Yuliyana dan Setyaningrum (2016).

Hasil penelitian Damiati dan Rini (2016) menunjukkan bahwa semakin banyaknya tindak lanjut audit yang dilihat dari nilai perkapita yang diserahkan ke kas negara, menyebabkan menurunnya tingkat korupsi. Penelitian yang dilakukan Yuliyana dan Setyaningrum (2016) yang meneliti tindak lanjut hasil audit terhadap persepsi korupsi di kementerian/lembaga menunjukkan bahwa semakin tinggi upaya instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menunjukkan upaya perbaikan yang tinggi terhadap hasil temuan, sehingga dapat mengurangi kecenderungan untuk korupsi.

Tindak lanjut hasil audit merupakan wujud pertanggungjawaban yang baik dari pemerintah daerah. Semakin tingginya rekomendasi dari BPK yang di tindaklanjuti hal itu memperlihatkan seberapa besarnya upaya perbaikan terhadap temuan yang ditemukan oleh BPK selama proses pengauditan. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK merupakan suatu upaya untuk mencegah terulangnya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan serta pemborosan APBD. Dengan melakukan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh BPK, pemerintah daerah telah berusaha untuk memperbaiki kesalahan terhadap pengendalian internal maupun kinerja yang akan menyebabkan kerugian daerah.

Kabupaten Sidoarjo merupakan kabuapten yang setiap tahunnya melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Hampir seluruh rekomendasi BPK dilaksanakan 100% oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tahun 2012 merupakan tahun dengan tindak lanjut hasil audit terkecil yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo selama 2012 – 2015 yaitu hanya sebesar 10%. Pada tahun 2012 juga terdapat kasus korupsi di Kabupaten Sidoarjo yang terkait suap pengurusan pajak. Namun ditahun selanjutnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo berbenah diri dengan meningkatkan tindak lanjut atas hasil audit berupa menjalankan rekomendasi – rekomendasi yang diberikan sehingga pada tahun – tahun selanjutnya pun tidak ada lagi kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo.

Menurut teori keagenan adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi dari BPK menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* ingin berbenah diri agar pemerintah daerah lebih baik lagi. Semakin banyaknya rekomendasi yang dijalankan maka perbaikan yang dilakukan semakin meningkat lagi. Hal ini tentu merupakan upaya dalam mengurangi dampak daru *asymetri information* dimana salah satunya ialah korupsi yang merupakan bagian dari *moral hazard* dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri.

Menurut teory *stewardship* upaya menjalankan rekomendasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah agar kepercayaan terhadap pemerintah dari masyarakat semakin meningkat. Banyaknya

rekomendasi yang dilakukan merupakan suatu tanggung jawab pemerintah dalam menekan potensi terjadinya korupsi yang dapat berakibat hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan yang telah diberikan kepercayaan serta tanggung jawab.

Tindak lanjut atas temuan tersebut yang mengurangi kemungkinan terjadinya tindak korupsi. Hal tersebut dikarenakan dengan temuan tersebut yang mengindikasikan akan atau sedang terjadinya hal yang tidak wajar di pemerintahan daerah segera di tangani dengan tindak lanjut atas temuan tersebut sehingga indikasi untuk terjadinya korupsi yang memiliki kemungkinan lebih besar telah di antisipasi lebih awal. Adanya tindak lanjut atas temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah sangat serius dalam mencegah adanya tindak korupsi yang terjadi dilingkungan pemerintahan daerahnya.